

KONTRIBUSI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA INDONESIA*

Muhardi**

Abstraksi

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam (natural resources) yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih, tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa, tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan tersebut terhadap peningkatan kualitas bangsa ini, semua pihak (stakeholders) mempunyai kontribusi yang penting termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal pengelola pendidikan selayaknya industri pendidikan harus dipandang sebagai noble industry (industri mulia) yang harus dikelola secara profesional, dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pemerintah di sisi lain harus mempunyai komitmen kesungguhan untuk berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, demikian pula dengan masyarakat harus menyadari akan kontribusi pendidikan bagi kemajuan dan kemakmuran masa depan bangsa ini, agar menjadi bangsa yang lebih maju.

Kata kunci : Pendidikan, kualitas bangsa Indonesia.

* Naskah Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen TA 2004/2005

** **Dr. Muhardi, SE.,M.Si.**, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pada milenium ketiga dihadapkan pada perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagian masyarakat memasuki masyarakat informasi walaupun sebagian berada pada masyarakat industri, dan sebagian lagi masih pada masyarakat agraris. Pada awal milenium ketiga bangsa Indonesia memasuki AFTA 2003 dan APEC 2010 yang menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk bersaing dan menjadi pemenang dalam persaingan global. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan ketidakpastian lingkungan di masa datang yang semakin tinggi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan karenanya salah satu upaya yang harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas bangsa dalam arti kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan.

Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya. Sebagai contoh adalah negara-negara seperti : Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya (Mohamad Surya, dalam Pikiran Rakyat 14 Juli 2004). Lambatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia selama ini sesungguhnya mencirikan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang sekaligus juga mencerminkan masih lemahnya sistem pendidikan di negara ini.

Ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya keberpihakan pemerintah sebagai penggagas dan pengayom masyarakat terhadap bidang pendidikan, karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kelemahan dalam bidang pendidikan ini menunjukkan ketidakberhasilan pemerintahan suatu negara dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Sebagai contoh keberhasilan negara Singapura dalam pendidikan didukung dengan komitmen penuh oleh pemerintah yang memangkas birokrasi pendidikan (Khoe Yao Tung, 2002 : 3). Ini menunjukkan pentingnya kesungguhan pemerintah dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Khoe Yao Tung (2002 : 2) menyatakan bahwa: “Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan pemerintahan suatu negara.

Berangkat dari pondasi pendidikan yang kokoh dan tepat, akan dapat diwujudkan cita-cita mulia suatu bangsa dalam berbagai sektor dan apek kehidupan termasuk kedisiplinan, etos kerja, nilai, dan moral suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan merupakan landasan bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan adalah kata kunci dalam mengembangkan pengetahuan dan kualitas kemampuan masyarakat. Ini artinya pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dukungan terhadap pentingnya kontribusi pendidikan dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di antara negara-negara di dunia ini, sesungguhnya telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengamanatkan bahwa, pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses keseluruhan pembangunan nasional.

Beranjak dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap bidang pendidikan di Indonesia melalui suatu tulisan sederhana ini dengan mengambil judul: “Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia”.

2. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Pasal 1 ayat (2) mengartikan bahwa: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut secara umum jelas mengarah pada peningkatan kualitas bangsa. Kualitas bangsa tiada lain mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dengan pendidikan yang sungguh-sungguh diarahkan pada pencapaian

fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat, unggul, dan diperhitungkan dalam pergaulan dan persaingan dunia.

Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Dalam kaitan ini, Rinehart dalam Daulat P. Tampubolon (2001 : 344) menyatakan: *“For years we have lied to young people, telling them they are the future of our country and our society. How can they build the future when we give them nothing whit which to build it? All we do is to hand over the responsibility with it we give them social, political, fiscal, and environment garbage”* (Bertahun-tahun lamanya kita membohongi generasi muda. Kita katakan mereka adalah masa depan bangsa dan negara, tetapi tidak memperlengkapi mereka untuk membangunnya. Yang kita wariskan hanyalah tanggung jawab atas kerusakan sosial, politik, keuangan, dan lingkungan).

Gambaran Rinehart tentang pentingnya mewarisi generasi muda untuk membangun bangsa, menunjukkan secara jelas perlunya pendidikan yang bermutu. Adanya ajakan dari para politisi dan pihak pemerintah untuk membangun bangsa ini, tidak akan dapat terealisasikan tanpa didukung oleh ketersediaan sistem pendidikan yang bermutu. Berbagai ajakan dan slogan tentang keberpihakan para politisi dan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan merupakan kebohongan besar, jika tidak ada kesungguhan dan niat baik yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang sungguh-sungguh bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, sebagaimana dikemukakan Daulat P. Tampubolon (2001:345-346) bahwa: “Kebohongan yang paling mendasar ialah apabila kita tidak mewariskan sistem pendidikan bermutu yang dapat memperlengkapi generasi muda agar mampu membangun bangsa dan negara ini untuk menghadapi tantangan zaman di masa datang. Disadari sepenuhnya dengan sistem pendidikan bermutu, generasi muda, khususnya para pemimpin penerus, akan mampu mengemban tanggung jawab berat itu. Mereka juga akan mampu memelihara dan meningkatkan mutu dari hasil-

hasil positif masa lalu. Semuanya itu mungkin, karena sumber daya manusia bermutu tersedia melalui sistem pendidikan bermutu”.

Sistem pendidikan yang bermutu membutuhkan manajemen pendidikan yang baik. Berbagai dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional mengarah pada pencapaian hasil pembangunan bangsa yang bermutu. Dimensi-dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional tersebut dapat terdiri dari dimensi ideologi, politikal, teknik, dan dimensi pembangunan. Adapun dimensi ideologi tentunya bersifat umum, begitu pula dimensi politikal yang semakin ke bawah semakin bersifat konkrit, karena dimensi pembangunan merupakan hasil-hasil nyata dari tindakan ideologis dan politikal yang dicapai melalui dimensi teknikal. Dimensi teknikal merupakan kiat-kiat dari para pendidik profesional yang menguasai ilmu pengetahuan kependidikan. Kiat-kiat tersebut dari yang bersifat umum, misalnya dalam merumuskan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sampai kepada unsur-unsur proses pendidikan meliputi: kurikulum, metode, supervisi, evaluasi, sampai kepada hasil dari proses itu sendiri berupa sikap, penguasaan IPTEK, dan keterampilan-keterampilan tertentu. Sehingga pada gilirannya hasil pendidikan itu sendiri dievaluasi dengan kriteria keberhasilannya untuk pembangunan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya dasar filosofikal dan konstitusional pembangunan sumber daya manusia Indonesia, pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Di sisi lain H.A.R. Tilaar (2001:2003) menyatakan, pada garis besarnya fungsi umum pendidikan nasional dapat dirumuskan dalam dua kategori, yakni politik dan kebudayaan. Secara politik, fungsi umum pendidikan nasional tentunya diarahkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berpikir peserta didik Indonesia. Nasionalisme yang sehat ini semakin diperlukan dalam era globalisasi. Namun demikian rasa nasionalisme saja belum cukup karena gelombang globalisasi yang melanda dunia dewasa ini dapat meleburkan nasionalisme itu sehingga dapat terdorong ke arah dua sikap ekstrim: hilangnya nasionalisme dan hanyut dalam internasionalisme yang semu, atau kepada sikap ekstrim lainnya ke arah nasionalisme fundamentalis yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk mekanisme bertahan (*defense mekanisme*) karena kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri.

Perlu dipahami bahwa yang erat kaitannya dengan lahirnya nasionalisme yang sehat ialah fungsi budaya dari pendidikan nasional, yaitu tumbuhnya rasa bangga atas kepemilikan suatu budaya nasional sebagai identitas bangsa. Pendidikan nasional mempunyai fungsi umum, ialah ke arah terbentuknya kepribadian nasional dari peserta didik yang konkrit dan utuh.

Deklarasi Dakkar (Pendidikan untuk semua) menyatakan enam hal : *Pertama*, memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. *Kedua*, menjamin bahwa menjelang tahun 2015, semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. *Ketiga*, menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai. *Keempat*, mencapai perbaikan 50% pada tingkat keaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang. *Kelima*, menghapus disparitas jender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan jender dalam pendidikan menjelang tahun 2015, dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atau akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas pendidikan yang baik. *Keenam*, memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting (D. Sudjana S., 2004:394).

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, karena itu pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membedakan apakah laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun orang dewasa yang sudah memenuhi usia sekolah. Indonesia adalah negara yang memiliki aturan, kebijakan, dan undang-undang yang lengkap tentang pendidikan, akan tetapi dalam implementasinya seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang semestinya. Kelemahan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut terletak pada para pelaku atau pelaksananya. Ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan yang baik menyebabkan bidang pendidikan ini seringkali dilihat sebelah mata oleh pihak-pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*), orientasi pendidikan tidak ditekankan pada kualitas, tetapi lebih banyak pada kuantitas dan kepentingan individu semata, sehingga pendidikan belum mendapatkan perannya sebagai landasan dalam membangun bangsa ini.

3. Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Pendidikan di Indonesia

Sasaran pendidikan di Indonesia pada tahun 2003 berjumlah 104.376.163 orang. Dari jumlah tersebut yang terlayani oleh lembaga-lembaga pendidikan formal sebanyak 46.929.690 orang (44, 96%), sedangkan yang tidak terlayani adalah 57.446.473 orang (55,04%). Berdasarkan usia pendidikan, perbedaan kedua kelompok sasaran pendidikan yang terlayani dan tidak terlayani tergambar pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1:
Jumlah Sasaran yang Terlayani dan Tidak Terlayani Berdasarkan
Tingkatan Usia Sekolah.

No.	Usia	Jumlah	Terlayani	%	Tidak Terlayani	%
1	00-06	26.172.763	6.159.300	27,35	19.013.563	72,65
2	07-12	26.857.117	24.434.796	94,50	1.422.141	5,50
3	13-15	13.095.083	7.293.961	55,70	5.801.122	44,30
4	16-18	13.466.700	4.352.759	32,32	9.113.941	67,68
5	19-24	25.784.400	4.352.759	14,31	22.095.706	85,69
	Jumlah	104.376.163	46.929.690	44,96	57.446.473	55,04

Sumber: D. Sudjana S. (2004:394).

Tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang terlayani pendidikan sekolah (pendidikan formal) baru mencapai sekitar 50%. Anak usia dini baru terlayani 27,35% melalui program Taman Kanak-kanak (*raudlatul atfal*). Anak usia sekolah dasar relatif baik, sudah terlayani hampir 95%. Anak usia SLTP (SMP), SMU (SMA), dan perguruan tinggi yang terlayani pendidikan sekolah makin kecil jumlahnya yaitu masing-masing 55,70%, 32,32%, dan 14,31%. Dengan demikian sekitar 50% merupakan sasaran pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal) melalui program kelompok bermain dan taman penitipan anak bagi usia dini. Paket A bagi anak yang tidak berkesempatan mengikuti sekolah dasar dan putus

sekolah dasar, paket B bagi lulusan SD, lulusan paket A, dan putus SLTP. Program paket C bagi lulusan SLTP, lulusan paket B, dan putus SMU. Bagi penduduk buta aksara dilayani melalui program pendidikan keaksaraan fungsional. Di samping itu, pada program-program pendidikan nonformal disajikan keterampilan fungsional atau kecakapan hidup (*life skills*) sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat serta potensi lingkungannya.

Tabel 1 menunjukkan pula bahwa khususnya untuk usia 16 sampai 24 tahun sebagian besar atau dominan masyarakat kita tidak mengecap pendidikan di tingkat SMU dan perguruan tinggi. Ini artinya sebagian besar masyarakat kita berdasarkan data tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu kebanyakan hanya mengecap pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sebagian di tingkat SMP. Dengan demikian dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Indonesia secara umum menunjukkan angka yang masih rendah. Keadaan ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, baik dalam tingkat pendidikan dasar, menengah, dan terutama jenjang pendidikan tinggi. Selain itu gambaran umum ini memperlihatkan perlunya keterpaduan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pengelola pendidikan termasuk swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam memacu pertumbuhan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik, dalam arti meningkatkan daya serap usia didik untuk mengikuti pendidikan guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia di masa-masa mendatang. Perlu diketahui bahwa, salah satu kelemahan bangsa ini dalam pendidikan karena kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pendidikan sebagai investasi bangsa yang berharga. Negara Malaysia menyatakan, walaupun anda kaya tapi kalau pendidikan rendah maka sesungguhnya anda miskin. Jadi pendidikan adalah hal yang utama. Selama ini mutu pendidikan kita belum menggembirakan, salah satunya adalah karena rendahnya *political commitment* dari pemerintah (Said Hamid Hassan, dalam Pikiran Rakyat 5 Juni 2004).

Sumber daya manusia Indonesia menggunakan waktu yang lebih singkat untuk belajar dibandingkan dengan sumber daya manusia di negara-negara ASEAN lainnya. Penduduk dewasa yang buta aksara, pada tahun 1990 sebesar 16%, sedangkan di beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Filipina, Srilangka, dan Singapura sekitar 2 sampai 12%. Angka partisipasi pada jenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi sama dengan angka partisipasi di beberapa negara ASEAN lainnya pada waktu 15 sampai dengan 20 tahun yang lalu. Penguasaan bahasa Inggris dan

komunikasi dengan dunia Internasional masih lemah menyebabkan daya saing masyarakat Indonesia di tingkat Internasional berada di belakang negara-negara ASEAN lainnya (Sudjana S, 2004:397).

3.2 Gambaran Umum Pendidikan di Beberapa Negara Lain

Berebekal penguasaannya dalam teknologi, khususnya teknologi informasi, India menargetkan menjadi negara maju dan satu dari lima negara penguasa dunia pada tahun 2002. Mimpi itu tidak muluk-muluk bila kita perhatikan kekuatan pendidikannya. Meski negara ini masih bergulat dengan persoalan buta huruf dan pemerataan pendidikan dasar, India mempunyai sederet perguruan tinggi yang benar-benar menjadi pusat unggulan dengan reputasi internasional. Digerakkan oleh keberadaan pusat-pusat unggulan itu, kini Pemerintah India sungguh-sungguh dalam membenahi pendidikan masyarakat bawah (Kompas 4 September 2004). Prestasi India dalam teknologi dan pendidikan sangat baik. Bila Indonesia masih dibayangkan-bayangi pengusiran dan pemerkosaan tenaga kerja tak terdidik yang dikirim ke luar negeri, maka banyak orang India mendapat posisi bergengsi di pasar kerja internasional. Bahkan di Amerika Serikat (AS), kaum profesional asal India memberi warna tersendiri bagi negara adikuasa itu. Sekitar 30% dokter di AS merupakan warga keturunan India. Tidak kurang dari 250 warga India mengisi 10 sekolah bisnis paling top di AS. Sekitar 40% pekerja *Microsoft* berasal dari India. Perlu diketahui bahwa, banyak orang-orang pintar India yang bekerja di luar negeri ikut membangun India (Kompas 4/9/2004).

Bukan hanya India yang pemerintahnya serius membenahi pendidikannya. Tiongkok yang sekarang menjadi kekuatan raksasa dalam ekonomi bangkit karena pendidikannya mempunyai tujuan yang jelas. Pendidikan Indonesia yang pada tahun 1970-an masih menjadi acuan dari negara-negara Asia Tenggara sekarang merosot ke bawah. Malaysia yang semula berguru ke Indonesia – mendatangkan dosen-dosen dari ITB, UI, dan IPB, maka dalam dua dekade ini telah melampaui pencapaian Indonesia. Singapura dan Filipina tidak diragukan lagi. Bahkan Thailand dan Vietnam mulai mengejar Indonesia (Kompas 4 September 2004). Hampir semua negara di Asia yang cukup diperhitungkan dalam pergaulan dunia menekankan pentingnya pendidikan.

Malaysia menjadi pendidikan sebagai program terpenting di negaranya. Thailand dengan perdana mentrinya Thaksin Shinawata melalui lima mentrinya berjuang sungguh-sungguh membenahi mutu pendidikan di

Thailand. Singapura yang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di Asia Tenggara memiliki program menciptakan masyarakat ilmu pengetahuan dan pendidikan seumur hidup. Jumlah siswa yang mendaftar masuk ke SMU dan perguruan tinggi di Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia, berada di atas pencapaian Indonesia (Kompas 4 September 2004).

Korea Selatan yang sudah tergolong negara maju dan ketat mengikuti kekuatan ekonomi Jepang sampai kini terus mementingkan pembangunan pendidikannya. Sejak dilanda krisis akibat imperialisme, disusul perang Korea, kemudian Korea Selatan bangkit menjadi pesaing kuat dua negara yang mengapitnya, Jepang dan Tiongkok. Sumber daya alam yang amat terbatas mendorong negara itu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Di kalangan orang Korea, mereka bersedia mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya. Sedangkan pemerintah membebaskan rakyatnya dari semua biaya pendidikan dari SD sampai SLTA. Untuk mengacu kemajuan pendidikannya Pemerintah Korea Selatan membuat program *Brain Korea 21* untuk membangun unit unggulan riset di institusi perguruan tingginya. Vietnam, negara yang sebelumnya tidak pernah kita perhitungkan, kini bergerak menyaingi Indonesia dalam pendidikan maupun ekonominya. Hanya dalam 20 tahun, Vietnam bisa melampaui Indonesia terutama dalam kemampuan sumber daya manusianya. Angka melek huruf di Vietnam melampaui Indonesia. Pemerintah menginvestasikan sekitar 3% dari produk domestik bruto (GDP) untuk pendidikan. Di tingkat daerah sekitar 18% sampai 20% anggaran dialokasikan bagi pendidikan. Pendidikan SD gratis. Di tingkat SLTP hanya sebagian kecil yang memungut biaya tambahan, itupun dibatasi maksimum 20 sampai 23 dollar AS per tahun (Kompas 4 September 2004).

Gambaran umum pendidikan di beberapa negara lain di atas menunjukkan bahwa, bidang pendidikan di Indonesia berada pada posisi yang tertinggal. Jika negara-negara lain menjadi kuat dan maju dengan menitik beratkan pendidikan sebagai kunci keberhasilan bangsanya, maka Indonesia secara umum belum menganggap pendidikan sebagai faktor kunci. Ini terbukti dari lambatnya kemajuan pendidikan di negara ini. Pihak politisi di Indonesia seringkali menggunakan bidang pendidikan sebagai promosi, lebih banyak berupa slogan yang tidak lebih dari *lip's sevice* belaka. Pemerintah masih setengah hati untuk berpihak pada sektor pendidikan, dan kurang mau belajar dari negara-negara tetangga untuk menumbuhkembangkan bidang pendidikan di tanah air. Padahal kemajuan

dan kualitas bangsa ini di masa datang akan ditentukan secara signifikan oleh kontribusi sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas.

3.3 Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia

Mengacu pada laporan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 2004, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diukur dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, jauh di bawah Singapura (25), Brunai Darussalam (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (85). Indikator pendidikan dalam komponen HDI memang tidak serta merta mencerminkan posisi pendidikan suatu negara karena ukuran-ukurannya yang bersifat kuantitatif. Namun melalui ukuran-ukuran tersebut kita dapat melihat bahwa, pendidikan di Indonesia secara makro sesungguhnya masih berada pada posisi tertinggal.

Disadari bahwa di era tahun 1950-an semua lulusan perguruan tinggi langsung mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasalnya, jumlah lulusan dan pasar tenaga ahli masih menguntungkan alumni perguruan tinggi. Kemudian, di era 1980-an, pasar tenaga kerja mulai selektif dan bervariasi. Untuk itu lulusan lembaga pendidikan tinggi tersebut harus menambah kemampuannya, semisal menyetik. Selanjutnya ada tuntutan menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Sekarang ini tuntutan makin ketat. Semua alumni perguruan tinggi harus menguasai sejumlah bahasa asing, teknologi informasi, pengetahuan teknologi tepat guna, serta menguasai perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Semua tuntutan itu harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi, karena mereka berkepentingan menghasilkan lulusan yang berkemampuan optimal dan sanggup bersaing di era global nanti (A Malik Fadjar, dalam Media Indonesia 6 September 2004).

Pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas bangsa Indonesia masih di pandang sebelah mata oleh pihak-pihak pengambil keputusan, terutama pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Padahal sejarah membuktikan bahwa negara-negara maju seperti Inggris, Rusia, Jepang, Cina, dan juga India menjadi maju karena negara-negara tersebut membangun pondasi pembangunannya melalui sektor pendidikan. Mereka membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Cina dan India sekarang telah menjadi negara besar yang tumbuh berkembang setelah kualitas

sumber daya manusianya maju (Muhammad Surya dalam *Pikiran Rakyat* 28 Juni 2003). Pada sisi lain, bidang pendidikan di Indonesia menunjukkan, profesi guru dan dosen belum mendapatkan penghargaan yang baik. Padahal profesi guru dan dosen harus menjadi profesi yang bergengsi seperti di Jerman.

Dengan berbagai krisis yang melanda bangsa ini, pendidikan belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung kualitas bangsa Indonesia yang terpuruk (*Pikiran Rakyat*, 22 Mei 2004). Lulusan dari lembaga pendidikan di Indonesia juga kurang relevan dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan, sehingga hasilnya kurang efektif dan mendorong terjadinya pengangguran intelektual. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah mutu pendidikan yang masih rendah di Indonesia, yaitu *pertama*, adalah revitalisasi budaya bangsa. Artinya bangsa ini harus kembali berpedoman kepada pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan adalah upaya utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki kreativitas pribadi yang terpuji. *Kedua* adalah manajemen pendidikan, dimana sistem pendidikan nasional yang disempurnakan dan disahkan pada 2003, implementasinya harus dilakukan dengan manajemen yang proporsional dan profesional, baik ditingkat makro maupun mikro.

Sejak krisis melanda Indonesia di masa Orde Baru (1996) penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,5 juta atau 22,2% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Angka penduduk miskin ini kemudian meningkat menjadi 49,5 juta orang atau 24,2% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1998, dan turun pada tahun 2002 menjadi 17,6%. Paralel dengan angka kemiskinan tersebut tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa, pada tahun 2000 data sensus nasional menunjukkan 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas tidak tamat SD atau belum pernah sekolah, 32,4% tamat SD, dan 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPS tahun 2002 terdapat 14% anak berusia 7-12 tahun dan 24% anak berusia 13-14 tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan. Sekalipun tidak ada data tahun 2004, bisa jadi angka tersebut tidak jauh berubah karena krisis ekonomi dan maraknya pungutan di sekolah-sekolah sebagai salah satu penyebab tingginya biaya sekolah (*Media Indonesia*, 22 Juni 2004).

Mangunwidjaya, dalam Taliziduhu Ndraha (1999:31), menyatakan arti pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan bangsa. Menurutnya bangsa yang tidak cerdas hanya mengikuti emosi belaka atau dangkal cara pengagasannya. Tidak mengetahui hubungan kausal sebab dan akibat, apalagi urusan prioritas....Akhirnya hanya tahu kekerasan, penindasan hak-hak asasi warganegara, khususnya kaum lemah, suka berbahasa teror serta merekayasa paksaan-paksaan yang justru senjata makan tuan. Orang yang tidak cerdas biasanya mudah memakai kekerasan sebagai cara penyelesaian sosial. Gejala-gejala kekerasan dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini merupakan indikator yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari angka pengangguran murni berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2001 sampai dengan 2002, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 berikut ini.

No.	Pendidikan	2000	2001	2002
1	SD – SLTA	5.131.000 Orang	7.464.000 Orang	8.612.000 Orang
	Perguruan Tinggi	460.000 Orang	541.000 Orang	519.000 Orang
	Total	5.591.000 Orang	8.005.000 orang	9.131.000 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Ace Suhaedi Madsupi (2003:4).

Berbagai gambaran tersebut sesungguhnya mencerminkan keterkaitan antara kontribusi pendidikan dengan kualitas bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, dalam arti kualitas bangsa yang baik. Sebaliknya rendahnya mutu pendidikan pada suatu negara menyebabkan lemahnya mutu sumber daya manusia negara tersebut. Ini artinya, tidak mungkin kita mengharapkan untuk menjadi negara dengan sumber daya manusia unggul tanpa didukung oleh sistem pendidikan yang bermutu baik. Negara-negara maju di dunia ini telah membuktikan bahwa, pendidikan memainkan peran kunci dalam mencerdaskan bangsanya, sehingga mereka menjadi bangsa yang maju dan besar. Karena itu sesungguhnya dapat dipahami jika keberpihakan pemerintah sangat penting dalam menumbuh-kembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas. Selain pemerintah, para pengelola pendidikan termasuk swasta, dan masyarakat juga memainkan peran yang penting. Keterpaduan dari berbagai pihak tersebut sangat dibutuhkan dalam mengupayakan dan mengoptimalkan secara nyata kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa ini.

4. Kesimpulan

Tidak ada suatu negara maju di dunia ini yang tidak menitikberatkan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia, dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah didasarkan pada sistem pendidikan yang lebih berkualitas.

Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan terhadap peningkatan kualitas bangsa Indonesia, semua pihak mempunyai kontribusi yang penting, apakah pengelola pendidikan itu sendiri, termasuk swasta, pemerintah, atau masyarakat pada umumnya. Dalam hal pengelola pendidikan selayaknya industri pendidikan harus dipandang sebagai *noble industry* (industri mulia), yang harus dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pemerintah di sisi lain harus pula mempunyai komitmen kesungguhan untuk berpihak pada kemajuan pendidikan, demikian pula dengan masyarakat harus menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat bernilai bagi peningkatan kualitas bangsa Indonesia. Dengan demikian bidang pendidikan merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang berkepentingan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan, guna mewujudkan bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, A. Malik. 2004. "Pendidikan Mahal Konsekuensi Logis di Era Global". Dalam *Media Indonesia* 6 September. Jakarta: PT. Citra Media Nusa Purnama.
- Hassan, Said Hamid. 2004. "Kita Akan Dijajah". Dalam *Pikiran Rakyat* 5 Juni. Bandung: PT. Percetakan Offset GRNESIA
- Madsupi. Ace Suhaedi. 2003. "Peluang Dunia Kerja dan Bisnis Masa Mendatang sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Sarjana UNISBA". *Makalah* Disampaikan pada Acara Saresehan UNISBA Menyongsong Masa Depan, 25 Oktober. Bandung UNISBA.
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Surya, Mohamad. 2004. "Pendidikan Murah, Mungkinkah?" Dalam *Pikiran Rakyat* 5 Juni. Bandung: PT. Percetakan Offset GRANESIA.
- S, D. Sudjana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Falah Production.
- Tampubolon, Daulat P. 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H.A.R.. 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tung, Khoe Yao. 2002. *Simponi Sedih Pendidikan Nasional*. Jakarta : Abdi Tandur.
- "Sekolah Semakin Silau bagi Si Miskin". Dalam *Media Indonesia* 27 Juni 2004. Jakarta: PT. Citra Media Nusa Purnama.
- "Pendidikan Indonesia Terpuruk di Tengah Kompetisi". Dalam *Kompas* 5 September 2004. Jakarta:
- "Pendidikan Dipandang Sebelah Mata". Dalam *Pikiran Rakyat* 28 Juni 2003. Bandung: PT. Offset GRANESIA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Departemen Nasional Republik Indonesia.